

POLITIK HUKUM PIDANA



EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

POLITIK HUKUM PIDANA

POLITIK HUKUM PIDANA

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

POLITIK HUKUM PIDANA

Penulis:

EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

Editor

Dr. Erna Dewi, SH.,MH

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

viii + 170 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Agustus 2019

ISBN: 978-623-211-082-3

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KEMENTERIAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNILA	
TANGGAL	08 Januari 2020
No. TERDAFTAR	002/PA/LP3M/2020
PP/RAFF	Inf

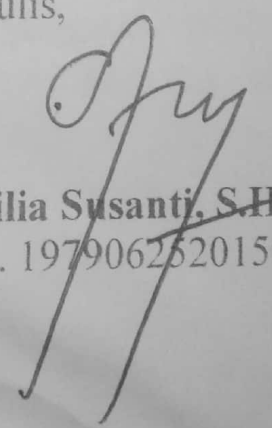
LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Politik Hukum Pidana
 Nama : Emilila Susanti, S.H., M.H
 NIP : 197906252015042001
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
 Jenis Buku : Buku ajar
 Nomor ISBN : 978-623-211-082-3
 Penerbit : AURA CV. Anugrah Utama Raharja
 Tahun Penerbitan : 2019
 Alamat Penerbit : Jl. Prof.Dr. Soemantri Brojonegoro,
 Komplek Unila Gedong Meneng Bandar
 Lampung

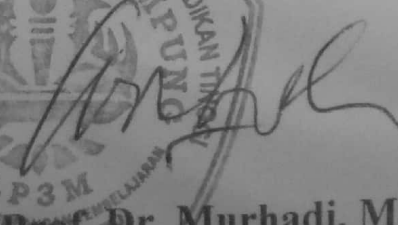
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H
 NIP. 196003101987031002

Bandar Lampung, November 2019
Penulis,


Emilia Susanti, S.H., M.H
 NIP. 197906252015042001

Menyetujui,
 Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran
 dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Lampung


Prof. Dr. Murhadi, M.Si
 NIP. 19640326198902100

DAFTAR ISI

BAB I TINJAUAN UMUM POLITIK HUKUM PIDANA

I. Pendahuluan	1
II. Kompetensi Dasar	2
III. Capaian Pembelajaran	3
IV. Materi dan Kegiatan Belajar	3
A. Definisi Politik Hukum, Politik Sosial dan Politik Hukum Pidana	3
1. Definisi Politik Hukum	3
2. Definisi Politik Sosial	6
3. Definisi Politik Hukum Pidana	8
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Politik Hukum Pidana	11
1. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana	11
2. Tujuan Politik Hukum Pidana	16
C. Hubungan Politik Hukum, Politik Hukum Pidana dan Politik Sosial	19
D. Politik Hukum Pidana yang Rasional	22
E. Umpan Balik	25
F. Latihan Soal	26
G. Glosarium	27

BAB II KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

I. Pendahuluan	28
II. Kompetensi Dasar	29
III. Capaian Pembelajaran	29
IV. Materi dan Kegiatan Belajar	30
A. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	30
B. Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Kejahatan	34
1. Pengertian	34

E. Urgensi Penanggulangan Kejahatan Melalui Upaya Penal (Hukum Pidana).....	36
C. Keterbatasan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan	40
D. Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan...	45
E. Pendekatan Integral dalam Penanggulangan Kejahatan ...	53
F. Ringkasan.....	55
G. Umpan Balik	59
H. Latihan.....	59
I. Glosarium.....	60

BAB III DASAR HUKUM POLITIK HUKUM PIDANA

I. Pendahuluan.....	62
II. Kompetensi Dasar	63
III. Capaian Pembelajaran	63
IV. Materi dan Kegiatan Belajar	63
A. Pengertian Dasar Hukum Politik Hukum Pidana	63
B. Tujuan Dasar Hukum.....	66
C. Latar Belakang perlunya Dasar Hukum.....	67
D. Pancasila sebagai Rechtsidee dan Filter Pembaharuan Hukum Pidana.....	68
E. Upaya dalam menjadikan Pancasila sebagai Rechtsidee dan Filter Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	74
F. Landasan Hukum Pembaharuan hukum pidana.....	81
G. Ringkasan.....	94
H. Umpan Balik	96
I. Latihan.....	96
J. Golsarium.....	97

BAB IV PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

I. Pendahuluan.....	99
II. Kompetensi Dasar.....	101
III. Capaian Pembelajaran	101
IV. Materi dan Kegiatan Belajar	101
A. Konsep Pembaharuan Hukum Pidana (Criminal Law Reform).....	101

B. Latar Belakang Perlunya Pembaharuan Hukum Pidana	107
C. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana	113
D. Pembaharuan Substansi Hukum Pidana	117
E. Pembaharuan Struktur Hukum Pidana	120
F. Pembangunan Kultur Hukum Pidana	126
G. Rangkuman	131
H. Umpan Balik	132
I. Latihan Soal	133
J. Glosarium	133

BAB V PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM RKUHP

I. Pendahuluan	136
II. Kompetensi Dasar	138
III. Capaian	138
IV. Materi dan Kegiatan Belajar	140
A. Pokok-Pokok Pemikiran Kriminalisasi dan Dekriminalisasi	140
B. Pokok-Pokok Pemikiran Pembaharuan Hukum Pidana Nasional	142
C. Pokok-Pokok Pemikiran Tentang Tindak Pidana dalam Konsep Pembaharuan RKUHP	146
D. Pokok-Pokok Pemikiran Pembaharuan Konsep Pertanggungjawaban Pidana	152
E. Pokok-Pokok Pemikiran Pembaharuan Sistem Pemidanaan	161
F. Umpan Balik	166
G. Latihan Soal	167
H. Glosarium	167